

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik wajib menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel (Indrayani & Widiastuti., 2020). Pelaporan keuangan merupakan elemen kunci dalam mencapai pengelolaan keuangan yang akuntabel untuk memberikan informasi kepada publik (Ridzal et al., 2022). Pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Aziyah & Yanto., 2020).

Pengelolaan keuangan pada Kabupaten Mukomuko menurut peraturan daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan pemerintah daerah atau Kabupaten Mukomuko bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dengan cara yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sehingga pada pengelolaan keuangan pemerintahan akan mendapat opini akuntabilitas publik yang baik. Opini yang diperoleh oleh Kabupaten Mukomuko disajikan pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Opini Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2023

NO	Tahun	Opini
1.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6.	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7.	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: hasil olahan peneliti, 2024.

www.google.com/amp/s/bengkulu.antaranwes.com jumat 12 mei 2023, dilihat dari Tabel di atas bahwa pemerintah Kabupaten Mukomuko meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah sebanyak 7 kali berturut-turut. Seluruh perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah setempat bersama-sama mempertahankan keberhasilan WTP, dengan WTP ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) semakin transparan dan akuntabel, untuk kedepannya dengan WTP ini membuat seluruh OPD terus berbenah dan meningkatkan *Monitoring Center For Prevention* (MCP), pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Mukomuko pengelolaan keuangannya cukup membaik dan berjalan sesuai aturan berdasarkan dari opini yang diraih selama 7 tahun yaitu 2017-2023.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko meraih WTP atas laporan keuangan pemerintah Tahun anggaran 2017-2023, akan tetapi pemerintah tak lepas dari perbaikan kinerja di semua jajaran. Bapak bupati mengatakan yang perlu di perhatikan yaitu regulasi dan aturan yang mengatur tentang sistem pemerintahan

ini terus senantiasa berkembang, agar semua OPD dengan Aparatus Sipil Negara (ASN) yang ada diharapkan dapat mencermati perkembangan perubahan regulasi. <https://radarmukomuko.bacakoran.co/amp/2390/pemkabmukomuko-opini-wtp-tujuh-kali-berturuturut?>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memuat pengaturan mengenai teknologi informasi secara umum. Pemerintah menggunakan peraturan untuk menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan operasi elektronik. Namun, tantangan implementasi masih ada di beberapa lembaga pemerintah pusat dan daerah. Keterbatasan anggaran umumnya merupakan hambatan utama dalam melaksanakan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Mukomuko telah melakukan beberapa terobosan untuk meningkatkan kualitas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Mukomko, diantaranya dengan penerapan sistem aplikasi E-Kinerja berbasis web (Ramadhan et al., 2023).

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam badan pemeriksa keuangan Kabupaten Mukomuko berhasil memperoleh WTP, tetapi meskipun demikian pencapaian tersebut tidak serta-merta menghapuskan adanya beberapa catatan perbaikan yang disampaikan badan pengelola keuangan (BPK). Kabupaten Mukomuko kembali berusaha mempertahankan predikat WTP, namun dengan tekanan yang lebih besar pada peningkatan sistem pengendalian intern dan pada teknologi informasi. Terdapat permasalahan yang terjadi berkaitan dengan keterbatasan anggaran umumnya menjadi hambatan utama dalam melaksanakan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan kemampuan operator yang

ditunjuk pada setiap perangkat daerah yang masih rendah, begitupun dengan pemanfaatan teknologi informasi perlu tekanan yang lebih besar juga, kedua hal ini menjadi tantangan Kabupaten Mukomuko untuk memastikan seluruh perangkat daerah menjalankan transparansi keuangan yang maksimal.

Menurut Rahmah et al., (2024) teori *Stewardship* yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bagian dari *Grand Theory* yang lahir dari gagasan akuntansi manajemen, teori *stewardship* yang bertujuan untuk mencapai hasil terutama untuk kepentingan milik organisasi. Artinya memberikan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabilitas yang diperlukan. Selain itu, pemerintah daerah dapat menunjukkan bahwa mereka adalah lembaga yang dapat dipercaya dengan menerima kritik dan saran dari masyarakat dan dapat memikul tanggung jawab secara maksimal (Sulistiyawati et al, 2020; Ainun, 2021; Septi et al, 2022 ; Yuniar et al, 2023).

Pengelolaan keuangan juga di pengaruhi oleh sistem pengendalian intern, menurut Arsal & Firdaus., (2023) sistem pengendalian intern adalah sesuatu yang meliputi struktur organisasi, metode dan berisi tindakan yang mendorong kepatuhannya pada kebijakan manajemen (Herawaty & Hernando, 2020; Sularsih & Wibisono, 2021; Aziyah & Yanto, 2022). Sistem pengendalian intern diartikan sebagai suatu proses atau rencana menyeluruh dalam keputusan dan peraturan pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan audit internal sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan suatu lembaga dan seluruh pegawainya dengan tujuan untuk menciptakan keyakinan terhadap tujuan organisasi (Indrayani & Widiastuti,

2020; Shafira & Utami, 2021; Mujannah et al, 2022; Kartawinagara & Rahayu, 2023).

Penelitian Sunarya & Mauludina., (2024) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Indrayani & Widiastuti, 2020; Shafira & Utami, 2021; Aziyah & Yanto, 2022; Nursin et al, 2023). Akan tetapi berbeda dengan penelitian Ega et al., (2024) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Abbas et al., 2022). Meskipun demikian berbeda dengan penelitian Roito et al., (2024) menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak berdampak pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Sumaryati et al, 2020; Sani & Bawono, 2022).

Adanya ketidak konsistenan pada penelitian terdahulu, memotivasi penelitian untuk menambahkan variabel teknologi informasi (Indrayani & Widiastuti., 2020). Teknologi informasi salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan, teknologi informasi tidak hanya berupa teknologi komputer (*hardware/software devices*) untuk mengolah dan menyimpan informasi, tetapi juga merupakan teknologi komunikasi untuk menyebarkan informasi, namun masih mempunyai keterbatasan. Menurut Indraswari., (2021) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berupa perangkat keras, perangkat lunak dan barang konsumsi, komponen-komponen tersebut digunakan untuk tujuan pengolahan data guna memperoleh informasi yang berkualitas tinggi, yaitu informasi yang akurat, relevan dan terkini (Ridzal et al, 2022; Yuniar et al, 2023; Ega et al, 2024).

Penelitian Hafizurrahman., (2024) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Ardianti et al, 2022; Nursin et al, 2023). Akan tetapi berbeda dengan Penelitian Ega et al., (2024) teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Meskipun demikian berbeda dengan penelitian Lantu et al., (2023) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah (Ekawati et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Teknologi Informasi Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mukomuko)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan sebelumnya maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Adanya tantangan implementasi SPI dan TI di Pemerintah Daerah yaitu: keterbatasan anggaran, kurangnya SDM , dan infrastruktur TI yang belum memadai.
2. Hasil *Research gap* pada penelitian yang tidak konsisten.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada variabel sistem pengendalian intern dan teknologi informasi dan sampel penelitian ini Pegawai Negeri Sipil pada OPD Kabupaten Mukomuko. Tujuannya adanya pembatasan variabel tersebut agar ruang

lingkup peneliti tidak terlalu luas, serta untuk menghindari kesalahan menyimpang dari pokok permasalahan serta tujuan yang di capai.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh sistem pengendalian intern terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Mukomuko?
2. Apakah pengaruh teknologi informasi terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Mukomuko?

1.5 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang tujuan umum dan tujuan khusus yang dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern dan teknologi informasi terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Mukomuko.

1.5.2 Tujuan khusus

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Mukomuko.

2. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Mukomuko.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, manfaatnya sebagai berikut:

1.6.1 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kendala dalam sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga solusi yang tepat dapat dirancang untuk mengatasi masalah tersebut.

1.6.2 Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pemerintahan di Indonesia.

1.6.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai sistem pengendalian intern dan teknologi informasi sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

Deskripsi konseptual menjelaskan bagian dari laporan penelitian yang berisi tentang penjelasan tentang teori yang relevan dengan tema penelitian dan menjelaskan tentang variabel pada penelitian ini, yang dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Teori *Stewardship*

Menurut Donaldson., (1991) teori *Stewardship* merupakan bagian dari *Grand Theory* yang lahir dari gagasan akuntansi manajemen, teori *stewardship* bertujuan untuk mencapai hasil terutama untuk kepentingan milik dan organisasi. Artinya, memberikan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabilitas yang diperlukan (Ainun, 2021; Hidayat et al, 2022; Yuniar et al, 2023; Rahmah et al, 2024).

Teori *stewardship* untuk menjelaskan bagaimana fungsi pemerintah daerah sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, untuk mencapai tujuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara optimal, pemerintah daerah dapat memenuhi aspirasi masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang unggul dan mengalihkan tanggung jawab masyarakat ke pemerintah (Nona et al, 2023; Putri et al, 2024).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu bisa mengungkapkan keberadaan pemerintah wilayah menjadi suatu forum yang bisa dipercaya, bisa menampung aspirasi warga, bisa menaruh pelayanan yang baik bagi publik dan bisa menciptakan pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, tujuan ekonomi terpenuhi dan kesejahteraan warga bisa tercapai secara maksimal (Indrayani & Widiastuti., 2020).

2.1.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiosmo., (2016) transparansi mengacu pada kesediaan pemerintah untuk transparan dalam memberikan pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Gagasan keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjaga rahasia negara dan hak asasi manusia secara individu dan kolektif, serta mengakomodasi hak masyarakat atas informasi yang akurat dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Masyarakat diberi kesempatan untuk mengetahui berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah secara akurat, jujur dan tidak diskriminatif dengan menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraannya. Transparansi pada akhirnya akan menumbuhkan tanggung jawab horizontal antara masyarakat dan pemerintah daerah sehingga menghasilkan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif, akuntabel dan responsif terhadap masyarakat (Sudrajat., 2021).

Transparansi dalam hal ini terkait pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Setiandini Merchilia., 2024).

Menurut Werimon et al., (2017) ada dua komponen prinsip transparansi: pertama hak masyarakat untuk mengakses informasi dan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah. Pemerintah diperkirakan akan membangun saluran

komunikasi yang luas dengan masyarakat mengenai berbagai isu terkait pembangunan sosial. Kedua rakyat mempunyai hak untuk mendapat informasi tentang segala hal yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Menurut Werimon et al., (2017) kerangka konseptual peningkatan transparansi organisasi sektor publik perlu memiliki empat elemen, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya sistem pelaporan keuangan
2. Adanya sistem pengukuran kinerja
3. Dilakukannya auditing sektor publik
4. Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*Channel of Accountability*)

Lebih lanjut apabila anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern diartikan sebagai suatu proses atau rencana menyeluruh dalam keputusan dan peraturan pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan audit internal sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan suatu lembaga dan seluruh pegawainya dengan tujuan untuk menciptakan keyakinan terhadap tujuan organisasi (Indrayani & Widiastuti, 2020; Shafira & Utami, 2021; Mujannah et al, 2022; Kartawinagara & Rahayu, 2023).

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. COSO merupakan sebuah organisasi swasta yang beranggotakan *the American Accounting Association (AAA)*, *AICPA*, *the Institute of Internal Auditor (IIA)*, *the Insitute of Management Accountants (IMA)*, dan *the Financial Executives Institute (FEI)* (Efa Wahyu Prastyaningtyas., 2019). Menurut COSO, ada lima elemen pengendalian intern:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah sarana dan infrastruktur untuk menerapkan struktur pengendalian internal yang tepat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Komponen-komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian internal adalah:

- a. Komitmen manajemen terhadap integritas dan etika filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya kerja yang diterapkan oleh manajemen.
- b. Struktur organisasi
 1. Komite audit dewan direksi
 2. Bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi
 3. Kebijakan dan praktik personalia
 4. Pengaruh eksternal
 5. Aktivitas pengendalian

2. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengawasan mengacu pada berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian operasi

Perusahaan. COSO mencantumkan sedikitnya 5 dari yang dapat diterapkan oleh Perusahaan, yaitu:

- a. Persetujuan transaksi dan kegiatan
- b. Penugasan tugas dan tanggung jawab
- c. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang tepat
- d. Perlindungan aset dan catatan perusahaan yang tepat
- e. Tinjauan independen atas kinerja perusahaan

3. Penilaian Risiko

Manajemen perusahaan harus mampu mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi perusahaan. Memahami risiko memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan pencegahan dan membantu perusahaan menghindari kerugian besar. Risiko yang dihadapi perusahaan meliputi risiko strategis, risiko keuangan, dan risiko informasi.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Dalam perancangan sistem informasi, perusahaan dan manajemen perlu mengetahui:

- a. Bagaimana transaksi dimulai.
- b. Bagaimana data dicatat dalam bentuk yang dapat langsung dimasukkan atau diubah ke dalam sistem komputer.
- c. Cara membaca, mengatur dan memperbarui file data.
- d. Bagaimana data menjadi informasi dan diproses lagi untuk menjadi informasi yang lebih berguna bagi pengambil keputusan.
- e. Bagaimana informasi yang baik dilakukan.

f. Bagaimana transaksi berhasil.

5. Monitoring

Merupakan kegiatan mengawasi jalannya sistem informasi akuntansi sehingga apabila terjadi kegagalan dapat segera diatasi. Berbagai bentuk pemantauan dalam suatu organisasi dapat dilakukan melalui salah satu atau semua proses berikut:

- a. Supervisi yang efektif (*effective supervision*) adalah manajemen yang lebih atas mengawasi manajemen dan karyawan di bawahnya.
- b. Akuntansi pertanggung jawaban (*responsibility accounting*) adalah perusahaan menerapkan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja masing-masing manajer, departemen dan proses yang dijalankan oleh perusahaan.
- c. Audit internal (*internal auditing*) adalah pengauditan yang dilakukan oleh auditor didalam perusahaan (Arifudin et al, 2020; Akhyaar et al, 2022).

Menurut Indrayani & Widiastuti., (2020) adapun fungsi sistem pengendalian intern adalah untuk mencegah kecurangan yang mungkin terjadi dan menjamin terselenggaranya anggaran dan aturan yang diberlakukan. Tujuan yang krusial menurut pengendalian ini merupakan memperoleh informasi keuangan dan non keuangan yang seksama mengenai operasi perusahaan buat keperluan pengambilan keputusan. Manajemen wajib menguji efektifitas aplikasi pengendalian. Tujuan penggunaan ini merupakan, apakah pengendalian sudah berjalan menaati beberapa aturan dan peraturan (Nur & Puspitosarie, 2023; Rahmany & Fatimah, 2020).

2.1.4 Teknologi Informasi

Menurut Kenneth., (2015) teknologi informasi adalah salah satu dari banyak perangkat yang digunakan manajer dalam mengantisipasi perubahan. Perangkat keras komputer (*computer hardware*) adalah perangkat fisik yang digunakan untuk kegiatan input, pemrosesan dan output dalam sebuah sistem informasi. Perangkat keras komputer tersebut terdiri atas komputer dari berbagai bentuk dan ukuran (termasuk perangkat mobile seukuran gengaman tangan) berbagai perangkat input, output dan penyimpanan serta perangkat telekomunikasi yang membuat komputer saling terhubung.

Menurut Indraswari., (2021) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berupa perangkat keras, perangkat lunak dan barang konsumsi, komponen-komponen tersebut digunakan untuk tujuan pengolahan data guna memperoleh informasi yang berkualitas tinggi, yaitu informasi yang akurat, relevan dan terkini. Manfaat yang diperoleh dengan memanfaatkan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

1. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, informasi yang diperlukan dapat dicari dengan cepat dan akurat.
2. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai alat untuk memudahkan penyampaian informasi agar mudah diterima dan dipahami.
3. Teknologi informasi dapat mengembangkan keterampilan belajar berbasis teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi yang sesuai dengan kurikulum (Ridzal et al, 2022; Yuniar et al, 2023; Ega et al, 2024).

Adapun beberapa komponen teknologi informasi:

- a. Komputer yang memadai adalah Perangkat elektronik yang di desain untuk menyimpan dan memproses data informasi.
- b. Penggunaan *Software* adalah program komputer yang memberikan instruksi kepada perangkat keras (*hardware*) untuk melakukan tugas-tugas tertentu.
- c. Pengolahan dan penggunaan jaringan adalah kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi.
- d. Sistem manajemen adalah serangkaian proses, prosedur dan alat yang digunakan untuk mengelola suatu organisasi atau sistem.
- e. Pemanfaatan jaringan adalah mengakses informasi dan sumber daya dengan cepat dan mudah.
- f. Sistem informasi terintegritas adalah salah satu konsep kunci dari sistem informasi manajemen yang dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lain.
- g. Penyimpanan data keuangan adalah proses menyimpan data-data yang berkaitan dengan keuangan suatu organisasi atau individu.
- h. Perawatan perangkat komputer adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga agar komputer berfungsi dengan baik (Rahayu & Kanita., 2023).

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa pendapat menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan dan menjadi sumber referensi dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1 :

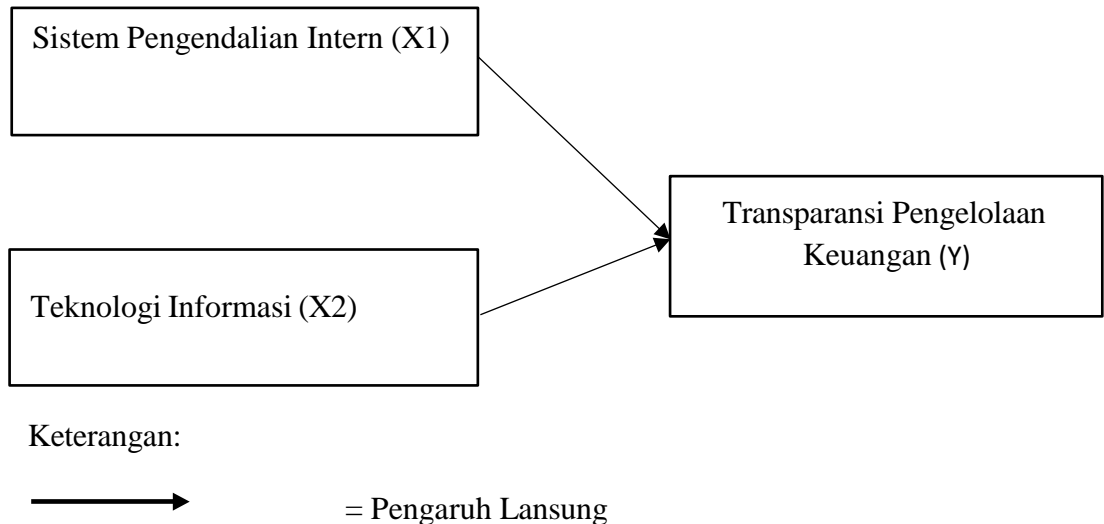
Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama Penulis, Tahun, Judul, Jurnal, Vol, Dan Hal.	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil
1	Asep Sunarya, Intan Mauludina, Silviana,(2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Standar, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur pada Pemerintah Kualitas Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Laporan, International Journal of Social Science and Business, vol 8 no 1,198-207.	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah standar skuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? - Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? - Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? - Apakah pengaruh kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian: pendekatan kuantitatif - Jenis data : data primer - Data skala ordinal diubah menjadi skala interval dengan menggunakan <i>analytical method of successive interval (msi)</i> Variabel yang digunakan a.Variabel independen - Standar akuntansi pemerintahan (bebas) - Sistem pengendalian intern (X1) - Pemerintah(X2) - Penggunaan teknologi informasi(X3) - Variabel kompetensi aparatur mandiri(X4) b.Variabel dependen - Terhadap kualitas laporan keuangan (y) 	<p>Hasil menyatakan bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah - Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah - Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah - Kemampuan aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah
2.	Mawar Maulana Nur, Ana Sopanah , Endah Puspitosarie (2023), Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan),vol 10,no.1, hal 48-58.	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? - Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? - Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Penelitian :pendekatan kuantitatif - Teknik analisis regresi linear berganda dan diolah menggunakan bantuan program aplikasi computer IBM SPSS Statistics 25. - Variabel yang digunakan a.variabel independen - Pemanahan akuntansi(X1) - Sistem informasi akuntansi (X2) - Sistem pengendalian intern (X3) b.variabel dependen kualitas laporan keuangan(y) 	<p>Hasil menyatakan bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman akuntansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan pada kualitas laporan - Pemanfaatan sia secara parsial tidak berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan - Sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
3.	Nining Asniar Ridzal dkk.(2022), Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah kualitas SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? - Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> - jenis penelitian: kuantitatif. - populasi : 33,sampel:132 - jenis data: Data primer - sumber data:kuisisioner - variabel yang digunakan: a.Variabel independen - kapasitas sumber daya manusia(X1) 	<p>Hasil menunjukkan bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kapasitas laporan keuangan pemerintah daerah - Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kapasitas laporan

No	Nama Penulis, Tahun, Judul, Jurnal, Vol, Dan Hal.	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil
	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, Owner: Riset dan jurnal akuntansi, vol 6 no 3,3094-3105.	laporan keuangan pemerintah daerah? - Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah?	- pemanfaatan teknologi informasi (X2) - sistem pengendalian intern(X3) b.Variabel dependen - laporan keuangan pemerintah daerah (Y)	keuangan pemerintah daerah - sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kapasitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4.	Ni Luh Mulya Dewi, Ni Wayan Yuniasih,(2021), Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Tingkat Pendidikan, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Mengwi,Hita Akuntansi Dan Keuangan.	- Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? - Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? - Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?	Populasi sebanyak 309, Metode pengambilan sampel <i>nonprobability sampling</i> dan sampel sebanyak 113 sampel pada LPD Kecamatan Mengwi.	Hasil menunjukkan bahwa - Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. - Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tingkat pendidikan - Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
5.	Dariana, Annisa Meidyaroza Harrie,(2020), Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (<i>Good Governance</i>) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Jas (Jurnal Akuntansi Syariah), Vol.4, No.1: 124-139.	- Apakah penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah (<i>good governance</i>)? - Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah (<i>good governance</i>)? - Apakah kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah (<i>good governance</i>)? - Apakah pengaruh ketaatan peraturan perundangan terhadap kinerja instansi pemerintah (<i>good governance</i>)?	sampel menggunakan metode sensus atau sampel jenuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: kuesioner, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data :menggunakan uji statistik. Variabel yang digunakan: a.Variabel independen - Penerapan akuntabilitas keuangan(x1) - Pemanfaatan teknologi informasi(x2) - Kompetensi aparatur pemerintah(x3) - Ketaatan peraturan perundangan(x4) b.Variabel dependen - Kinerja instansi - Pemerintah(Y).	Hasil menyatakan bahwa - Penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah (<i>good governance</i>). - Secara parsial pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah (<i>good governance</i>). - Secara parsial kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah (<i>good governance</i>). - Secara parsial ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah (<i>good governance</i>).

2.3 Kerangka konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern dan teknologi informasi terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sekaran & Bougie., (2021) variabel merupakan apapun yang bisa membedakan atau membarui suatu nilai. Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis variabel yaitu variabel independen Sistem Pengendalian Intern (X1), Teknologi Informasi (X2), dan variabel dependen Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan indikator pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Definisi Operasional

NO	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Sistem Pengendalian Intern (X1)	Sistem pengendalian intern adalah sesuatu yang meliputi struktur organisasi, metode dan berisi tindakan yang mendorong kepatuhannya pada kebijakan manajemen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian 2. Kegiatan pengendalian 3. Penilaian risiko 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian intern (Efa Wahyu Prastyaningtyas., 2019)
2	Teknologi Informasi (X2)	Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, barang konsumsi dan komponen-komponen tersebut digunakan untuk tujuan pengolahan data guna memperoleh informasi yang berkualitas tinggi, yaitu. Informasi yang akurat, relevan dan terkini.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer yang memadai 2. Penggunaan <i>software</i> 3. Pengolahan dan penggunaan jaringan 4. Sistem manajemen 5. Pemanfaatan jaringan 6. Sistem informasi terintegritas 7. Penyimpanan data keuangan 8. Perawatan perangkat komputer (Indraswari., 2021).

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan belum pasti tetapi bisa diuji tentang suatu masalah penelitian yg memprediksi apa yg ingin dipelajari peneliti menggunakan data empiris (Sekaran & Bougie., 2021). Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.5.1 Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Pengelolaan

Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Arsal & Firdaus., (2023) sistem pengendalian intern adalah sesuatu yang meliputi struktur organisasi, metode dan berisi tindakan yang mendorong kepatuhannya pada kebijakan manajemen (Herawaty & Hernando, 2020; Sularsih & Wibisono, 2021; Aziyah & Yanto, 2022). Sistem pengendalian intern diartikan sebagai suatu proses atau rencana menyeluruh dalam keputusan dan peraturan pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan audit intern sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan suatu lembaga dan seluruh pegawainya dengan tujuan untuk menciptakan keyakinan terhadap tujuan organisasi (Indrayani & Widiastuti, 2020; Shafira & Utami, 2021; Mujannah et al, 2022; Kartawinagara & Rahayu, 2023).

Teori *stewardship* adalah sebuah teori terkait menggunakan tata kelola perusahaan di mana pada teori ini menyebutkan bahwa manajer perusahaan menjadi pengelola akan bertindak demi kepentingan pemilik, organisasi dan mengesampingkan kepentingan pribadinya. Teori ini mengasumsikan bahwa manajer menjadi pengelola perusahaan mempunyai sifat amanah, jujur dan bertanggung jawab maka, tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan pemilik perusahaan (Ainun, 2021; Hidayat et al, 2022; Yuniar et al, 2023).

Sunarya & Mauludina., (2024) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan

(Indrayani & Widiastuti, 2020; Shafira & Utami, 2021; Aziyah & Yanto, 2022; Nursin et al, 2023). Berdasarkan pemaparan di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh terhadap Transparansi

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

2.5.2 Teknologi Informasi Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan

Pemerintah Daerah

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, barang konsumsi dan komponen-komponen tersebut digunakan untuk tujuan pengolahan data guna memperoleh informasi yang berkualitas tinggi, yaitu informasi yang akurat, relevan dan terkini (Indraswari, 2021; Ridzal et al, 2022; Yuniar et al, 2023; Ega et al, 2024).

Teori *Stewardship* merupakan bagian dari *Grand Theory* yang lahir dari gagasan akuntansi manajemen, teori *stewardship* yang bertujuan untuk mencapai hasil terutama untuk kepentingan milik dan organisasi. Artinya, memberikan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabilitas yang diperlukan. Selain itu, pemerintah daerah dapat menunjukkan bahwa mereka adalah lembaga yang dapat dipercaya dengan menerima kritik dan saran dari masyarakat dan dapat memikul tanggung jawab secara maksimal (Sulistiyawati et al, 2020; Ainun, 2021; Hidayat et al, 2022; Yuniar et al, 2023).

Menurut Yuniar et al., (2023) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat

meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan (Ardianti et al, 2022; Nursin et al, 2023; Hafizurrahman, 2024). Berdasarkan pemaparan di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah